

## POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI AWAL PANDEMI NOVEL CORONAVIRUS DISEASE: JANUARI - AGUSTUS 2020

**Luerdi**

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Abdurrab  
Email: luerdi@univrab.ac.id

### ***Abstract***

*Novel Coronavirus Disease or COVID-19 has been a global concern since it was announced as the pandemic. The disease has affected all countries especially their behaviors towards others. That in early time of the pandemic in which many were still unknown has encouraged various reactions among countries. This paper describes Indonesia's foreign policy in responding to the COVID-19 in early time of the pandemic from January to August 2020. The paper argues that Indonesia preferred cooperation and collaboration believed as the virtues of multilateralism practice despite populist trend shown by more developed world when the disease was crippling a number of countries badly.*

**Keywords:** *Indonesia, COVID-19 pandemic, foreign policy, multilateralism, cooperation, collaboration, populist trend.*

### **Pendahuluan**

*Novel Coronavirus Disease (COVID-19) pertama kali dilaporkan muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019 dan diumumkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada 11 Maret 2020 (World Health Organization, 2020). COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara pada akhir April 2020 (Lebni et al., 2020). Pada 11 Agustus 2020, tercatat ada sebanyak*

20.254.662 kasus terkonfirmasi COVID-19 dan 738.930 kematian secara global (Worldometer, 2020).

Pemerintah-pemerintah negara harus memutuskan pilihan sulit antara sejumlah besar kematian atau keruntuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan *lockdown* (Bol et al., 2020). COVID-19 mempengaruhi politik domestik dan hubungan antar negara serta mengganggu ekonomi global. Situasi ini dapat ditunjukkan oleh protes pro-kontra di

antara warga merespons langkah-langkah keamanan ketat pemerintah mereka, meningkatnya keraguan terhadap lembaga-lembaga internasional, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ancaman resesi. Pandemi tidak hanya meningkatkan tensi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi juga mendorong persaingan kepemimpinan global pasca-COVID-19 (Akon & Rahman, 2020).

Walaupun Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kasus COVID-19 pertama warga negara Indonesia pada 2 Maret 2020 (Djalante et al., 2020), kritik dan keraguan muncul karena seharusnya Indonesia dapat lebih awal mendeteksi kasus-kasus yang dikonfirmasi ketika COVID-19 melumpuhkan Tiongkok, Republik Korea (ROK) dan Iran pada Januari dan Februari 2020 (Mietzner, 2020). Sejak itu, Indonesia telah menjadi salah satu yang paling terdampak dalam hal kasus terkonfirmasi dan kematian di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada 11 Agustus 2020, dilaporkan ada sebanyak 127.071 kasus yang dikonfirmasi dan 5.765 kematian di Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Indonesia tidak hanya menderita kerugian

ekonomi karena pembatasan domestik, warga negara Indonesia di luar negeri juga telah merasakan dampak sejak pemerintah-pemerintah negara asing mengeluarkan kebijakan ketat yang menargetkan warga asing.

*Asian Development Bank* (ADB) memperkirakan Indonesia akan sangat menderita dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih karena statusnya sebagai negara berpenduduk terbesar ke-empat di dunia (Djalante et al., 2020). Pandemi akan menunjukkan kapasitas yang timpang di antara negara-negara untuk bertindak, sementara pihak-pihak tertentu dapat mencari keuntungan di saat bersamaan (Dodds et al., 2020). Pandemi tidak dapat dihindari dan semua negara terpukul, sehingga Indonesia telah secara aktif merespons dan menyadari bahwa tidak ada satu pun negara dapat mengelola pandemi sendirian.

### **Multilateralisme: Kerja Sama dan Kolaborasi Internasional**

Pandemi COVID-19 adalah masalah global yang mempengaruhi semua negara dengan sangat cepat terlepas dari jarak geografis, kemampuan ekonomi, dan tingkat kesiapan. Tindakan beberapa

negara ironisnya tidak mencerminkan diplomasi konstruktif karena cenderung tidak terkoordinasi dan didorong oleh sentimen nasionalis alih-alih respons sebagai bagian dari masyarakat internasional (Triwibowo, 2020). Namun, Indonesia menyadari bahwa negara-negara tidak akan dapat mengelola pandemi sendirian ataupun menghindarinya. Sebaliknya, Indonesia percaya bahwa hanya dengan kerja sama dan kolaborasi semua negara akan dapat mengurangi dampak pandemi seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi dalam sambutannya pada konferensi virtual *Ministerial Meeting for the Alliance for Multilateralism* pada 16 April 2020:

*"No country is able to overcome this crisis alone. In this connection, we have no other option but to count on the WHO to be a platform of cooperation among countries. This crisis provides a momentum to review the global health governance system so that it will be able to better deal with future outbreaks (Marsudi, 2020a)."*

Indonesia masih menaruh kepercayaan pada WHO sebagai organisasi kesehatan dunia yang akan mengkoordinasikan kerja sama internasional melawan pandemi meskipun

ada beberapa kritik atas responsnya yang lambat dan tuduhan *China-centric*. Sebagai anggota WHO, Indonesia mengharapkan organisasi internasional tersebut dapat memfasilitasi kerja sama untuk mitigasi pandemi yang efektif. Selain itu, Indonesia mengingatkan bahwa WHO mengevaluasi seberapa efektif sistem tata kelola kesehatan dunia saat ini dapat bekerja menghadapi COVID-19 dan beberapa masalah serupa di masa depan. Pendirian Indonesia tersebut menunjukkan pentingnya untuk terus berada bersama organisasi kesehatan dunia tersebut.

Karena pandemi COVID-19 menyebabkan banyak dampak, Indonesia berharap melalui lembaga multilateral semua negara tidak akan menghadapi kesulitan dalam mengakses semua kebutuhan seperti peralatan pelindung esensial serta pasokan medis lainnya. Sementara itu, perdagangan tidak boleh terganggu untuk meminimalkan kerugian ekonomi. Dalam hal ini, Menlu Marsudi mengatakan, *"we must ensure that our multilateral system delivers to address the immediate need of our people"* (Marsudi, 2020a). Indonesia menyampaikan pesan bahwa semua negara terlepas dari status mereka harus dapat mengambil keuntungan dari kerja sama internasional

dan kolaborasi dalam multilateralisme terutama selama pandemi.

Kerja sama harus dikedepankan karena semua negara berbagi tanggung jawab untuk memerangi pandemi. Indonesia bersama lima negara lainnya, yakni Ghana, Liechtenstein, Norwegia, Singapura dan Swiss mendorong solidaritas global melawan pandemi COVID-19 menjadi resolusi United Nations General Assembly (UNGA) pada 2 April 2020 yang didukung oleh 188 negara anggota (Marsudi, 2020b). Upaya tersebut merupakan diplomasi Indonesia terutama untuk memperkuat solidaritas global menghadapi situasi sulit seperti pandemi yang belum pernah dihadapi di masa lalu.

### **Prioritas Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Sejak pandemi COVID-19, kebijakan luar negeri Indonesia memiliki tiga prioritas, yaitu mengatasi pandemi itu sendiri, mengurangi dampak ekonomi dan melindungi warga negara Indonesia di luar negeri dan warga negara asing di Indonesia (Marsudi, 2020b). Dalam hal mengatasi pandemi, di berbagai forum internasional Indonesia terus mengajak

semua negara untuk bekerja sama mengatasi pandemi ketimbang saling menyalahkan. Indonesia menegaskan agar proteksionisme dan isolatisme dihindari. Arus lintas batas peralatan medis dan kebutuhan terkait lainnya seharusnya tidak mengalami hambatan apa pun sehingga setiap pemerintah akan dapat mengaksesnya untuk menyelamatkan nyawa atau meminimalkan korban COVID-19.

Indonesia sudah mengirimkan alat perlindungan ke negara-negara yang terinfeksi sebelum COVID-19 diumumkan sebagai pandemi (Marsudi, 2020b). Dengan demikian seharusnya negara-negara lain melakukan hal yang sama karena semakin banyak negara akan menderita akibat kurangnya peralatan perlindungan. Berbagi informasi, bantuan teknis dan produksi bersama peralatan medis dasar yang harus menjadi nilai dalam persahabatan global selama masa sulit adalah pesan diplomasi Indonesia (Marsudi, 2020c). Selain itu, Indonesia percaya bahwa koordinasi dengan WHO sangat penting karena mengabaikan protokol kesehatan dan rekomendasi organisasi dunia tersebut hanya akan menyebabkan masalah lebih buruk. Setelah vaksin ditemukan di masa depan,

semua negara termasuk dunia ke-tiga harus dapat mengakses ketimbang membiarkan praktik monopoli vaksin di negara-negara tertentu.

Pandemi COVID-19 sudah berdampak pada ekonomi global sebagai akibat dari gangguan rantai pasokan global dan pembatasan pergerakan orang dan penutupan perbatasan. ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara akan turun 1 persen pada 2020, sementara *World Bank Group* (WBG) memperkirakan akan ada 11 juta orang yang jatuh ke dalam kemiskinan baru di Asia Timur dan Pasifik (Marsudi, 2020b). Lebih lanjut, *International Monetary Fund* (IMF) melaporkan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan masalah ekonomi terburuk setelah peristiwa *Great Depression* (Marsudi, 2020d). Untuk mengurangi dampak ekonomi, Indonesia mendesak lembaga ekonomi global dan regional menjadi wadah yang dapat diandalkan untuk mencegah ekonomi global memburuk dan membantu negara-negara yang lemah untuk meminimalkan kemerosotan pada ekonomi nasional mereka di tengah upaya global untuk menahan penyebaran COVID-19 lebih lanjut.

Pada *the Extraordinary Senior Officials Meeting of Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), Indonesia mendesak organisasi tersebut mengambil langkah realistis untuk merespons dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi seperti yang dikatakan delegasi Indonesia Mr. Desra Percaya:

*“The implementation of the Trade Facilitation Agreement, transparency on policy implementation and reinforcement of the logistical system are concrete initiatives APEC could take. These would smoothen the trade flow in the Asia Pacific region during the pandemic”* (Percaya, 2020).

Arus barang harus tetap terjaga meski ada ancaman pandemi sebagai salah satu langkah untuk memitigasi dampak ekonomi. Indonesia percaya bahwa proteksionisme tidak akan berhasil dan tidak ada negara yang akan bertahan sendirian selama pandemi. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Indonesia pada pertemuan internasional lainnya.

Pandemi COVID-19 memaksa banyak pemerintah untuk memberlakukan langkah-langkah tegas terhadap warga negara asing mulai dari persyaratan karantina hingga pengusiran. Ketika COVID-19 menyebar dengan sangat cepat, banyak pemerintah asing

memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran lebih lanjut yang berdampak pada warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri. Menyadari situasi ini, kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan untuk menjamin WNI aman. Kementerian Luar Negeri Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah asing serta kedutaan atau konsulat Indonesia sehingga WNI dapat meninggalkan negara-negara tersebut secara sukarela dengan tertib atau dapat menerima bantuan kemanusiaan bila tetap berada di sana (Jakarta Post, 2020a). Sebagai pengecualian, Indonesia melakukan misi evakuasi WNI yang terjebak di kota Wuhan yang telah diisolasi setelah mendapatkan izin dari pemerintah Tiongkok pada 1 Februari 2020 (Strait Times, 2020).

Untuk warga negara asing di dalam negeri, pemerintah Indonesia menjaga komunikasi dengan kedutaan asing mengenai informasi terkini COVID-19 seperti warga asing yang berada dalam pengawasan, terinfeksi, kematian serta kasus yang sembuh. Pada bulan Juni, Menlu Marsudi mengumumkan bahwa sebanyak 311 warga asing terkonfirmasi positif COVID-19, 26 di antaranya meninggal dan 204 sembuh dan 485

lainnya diklasifikasikan sebagai orang dalam pengawasan (Jakarta Post, 2020b). Pemerintah Indonesia hanya membatasi warga negara asing untuk memasuki Indonesia dengan menanggukkan kebijakan pembebasan visa dan fasilitas *visa on arrival* bersamaan dengan penerapan protokol kesehatan ketimbang melarang mereka sama sekali untuk memasuki Indonesia.

Kebijakan luar negeri Indonesia selama pandemi tidak hanya bertujuan untuk melindungi WNI dan ekonominya tetapi juga yang lainnya. Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah asing diperlukan untuk mengejar tiga prioritas tersebut. Tindakan sepihak dan tidak terkoordinasi hanya akan membahayakan kepentingan Indonesia dan negara lainnya selama masa ketidakpastian. Politik luar negeri tersebut didorong oleh multilateralisme yang diyakini oleh Indonesia.

### **Saluran-Saluran Komunikasi**

Untuk merespons pandemi COVID-19, Indonesia memanfaatkan beberapa organisasi regional dan global sebagai saluran komunikasi seperti *the ASEAN Plus Three (APT) Special Summit*,

*Organization of Islamic Cooperation (OIC) Steering Committee on Health, Group of Twenty (G20) Extraordinary Leaders Summit, dan International Coordination Group on COVID-19 (ICGC)* (Marsudi, 2020b).

Pada 14 April 2020, APT mengeluarkan satu pernyataan bersama tentang COVID-19 setelah perhelatan *the APT Senior Officials Meeting on Health Development* pada Februari 2020, *the China-Japan-ROK Foreign Ministers' Special Video Conference on COVID-19* pada Maret 2020, dan *the Special Conference of the APT Health Ministers in enhancing cooperation on COVID-19* pada April 2020 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020).

Pertemuan tersebut mengakui partisipasi masyarakat dan menyambut lembaga keuangan internasional untuk mendukung negara-negara yang membutuhkan menggunakan dan meningkatkan kemampuan mereka selain menekankan pentingnya peran WHO dalam memimpin kampanye untuk mengendalikan dan menahan penyebaran pandemi dan untuk menerapkan langkah-langkah kesehatan berdasarkan *the International Health Regulation* (Kemlu, 2020). APT memiliki peran dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di Asia Timur, sehingga APT

diharapkan dapat membangun solidaritas dan kerja sama dalam menghadapi COVID-19 di kawasan Asia Timur.

Pada 9 April 2020, OIC melalui *the Steering Committee on Health* mengadakan pertemuan luar biasa untuk mengatasi penyakit tersebut di dunia Muslim. Piagam OIC membuka ruang kerja sama dan koordinasi di antara negara-negara anggota dalam menghadapi keadaan darurat kemanusiaan, sehingga pertemuan tersebut dilakukan untuk berbagi pengetahuan dan informasi tentang pandemi dan membahas cara dan sarana untuk mengkoordinasikan tanggung jawab individu dan kolektif di antara negara-negara anggota. (Organization of Islamic Cooperation, 2020). Pertemuan tersebut juga meninjau tingkat kesiapan negara-negara anggota dalam menghadapi pandemi dan menekankan perlunya menerapkan rencana kesiapsiagaan dan respons darurat nasional di negara-negara anggota (OIC, 2020).

Pada Maret 2020, para pemimpin G20 mengadakan KTT Luar Biasa terkait COVID-19. Sebagai kelompok ekonomi besar dunia, G20 berkomitmen untuk mengatasi pandemi COVID-19 bersama dengan WHO, IMF, WBG, PBB dan

organisasi internasional lainnya. Selama KTT, para pemimpin G20 menyampaikan kepedulian untuk memerangi pandemi, menjaga ekonomi global, mengatasi gangguan perdagangan internasional dan meningkatkan kerja sama global (Group of Twenty, 2020). KTT tersebut mengakui pandemi sebagai ancaman bersama sehingga solidaritas yang panjang dengan respons global yang transparan, kuat, terkoordinasi, berskala besar dan berbasis sains diperlukan di dunia yang saling terkait dan rentan (G20, 2020).

ICGC bertujuan untuk menyelesaikan tantangan pandemi COVID-19 terutama vaksin. Penemuan vaksin adalah upaya global yang akan menghentikan pandemi, namun terlihat seperti perlombaan di antara negara-negara dan perusahaan mereka untuk menjadi yang pertama memproduksinya. Mengenai hal ini, Indonesia terus mengajak bahwa alokasi vaksin harus adil untuk semua termasuk kelompok rentan. Upaya Indonesia untuk memastikan keterjangkauan vaksin merupakan tantangan terbesar dalam diplomasinya selama pandemi karena produksi dan distribusi vaksin akan terkonsentrasi di negara-negara maju (Jailani, 2020). Selain itu, pada forum ICGC, Indonesia

mengusulkan agar perusahaan-perusahaan dari berbagai negara dapat bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas dan produksi peralatan kesehatan dan obat-obatan dalam skema *joint-production* (Anadolu Agency, 2020).

Menlu Marsudi menegaskan berbagai pertemuan virtual tersebut merupakan bentuk konkret dari *partnership* yang harus terus dilakukan untuk mengatasi masalah global terutama dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh pandemi (Martha, 2020). Selain itu, Indonesia menyadari bahwa sikap dan upayanya hanya dapat didengar di berbagai forum internasional untuk mengatasi pandemi COVID-19. Indonesia memanfaatkan semua saluran yang tersedia untuk mempromosikan kerja sama dan kolaborasi antar masyarakat internasional baik di tingkat regional maupun global. Saluran semacam itu bisa menjadi media yang cocok untuk mempromosikan multilateralisme selama masa sulit.

## **Kesimpulan**

Politik luar negeri Indonesia yang aktif selama pandemi COVID-19 yang belum



pernah terjadi sebelumnya bisa menjadi pilihan berbeda dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara yang lebih mapan dan bagian lain dunia khususnya di awal pandemi. Pada saat negara-negara tersebut mengambil tindakan sepihak seperti *lockdown* yang tidak terkoordinasi, karantina dan pengusiran warga asing dan bahkan mengkambinghitamkan pihak lain, Indonesia lebih memilih menjunjung tinggi kerja sama dan kolaborasi internasional yang merupakan *virtue* utama dalam multilateralisme untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Forum Internasional adalah media utama bagi Indonesia untuk mempromosikan praktik multilateralisme.

### Tentang Penulis

Luerdi, S.IP., M.Si merupakan dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Abdurrah.

### Referensi

Akon, M.S., & Rahman, M. (2020). Reshaping the Global Order in the Post COVID-19 Era: A Critical Analysis. *Chinese Journal of*

*International Review*, 2(1): 1-15.

DOI: 10.1142/S2630531320500067

Anadolu Agency. (2020). Indonesia Usulkan Negara ICGC Kerja Sama Alat Kesehatan Covid-19. April 29.

<https://www.aa.com.tr/id/nasional/indonesia-usulkan-negara-icgc-kerja-sama-alat-kesehatan-covid-19/1822241>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). Hub InaCOVID-19. <https://bnpb-inacovid19.hub.arcgis.com/>

Bol, D., et al. (2020). The Effect of Covid-19 Lockdowns on Political Support: Some Good News for Democracy? *European Journal of Political Research*: 1-9. DOI: 10.1111/1475-6765.12401

Djalante, R., et al. (2020). Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science* 6: 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>

Dodds, K., et al. (2020). The COVID-19 Pandemic: Territorial, Political and Governance Dimensions of the Crisis. *Territory, Politics,*

- Governance*, 8(3): 289–298.  
<https://doi.org/10.1080/21622671.2020.1771022>
- Group of Twenty. (2020). Extraordinary G20 Leaders' Summit Statement on COVID-19.  
[https://g20.org/en/media/Documents/G20\\_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit\\_Statement\\_EN%20\(3\).pdf](https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit_Statement_EN%20(3).pdf)
- Jailani, A.K. (2020). How Indonesian Diplomacy Can Ensure Equitable Access to Covid-19 Vaccine. *Jakarta Globe*, May 29.  
<https://jakartaglobe.id/opinion/how-indonesian-diplomacy-can-ensure-equitable-access-to-covid19-vaccine>
- Jakarta Post. (2020a). Govt Urges Indonesians Abroad to Stay Put, Promises Aid During COVID-19 Pandemic. April 1.  
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/31/govt-urges-indonesians-abroad-to-stay-put-promises-aid-during-covid-19-pandemic.html>
- Jakarta Post. (2020b). More Than 300 Foreigners Infected with COVID-19 in Indonesia with 26 Deaths. June 12.  
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/12/more-than-300-foreigners-infected-with-covid-19-in-indonesia-with-26-deaths.html>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020). Joint Statement of the Special ASEAN Plus Three Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).  
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/1206/pidato/joint-statement-of-the-special-asean-plus-three-summit-on-coronavirus-disease-2019-covid-19>
- Lebni, J.Y., et al. (2020). How the COVID-19 Pandemic Effected Economic, Social, Political, and Cultural Factors: A Lesson from Iran. *International Journal of Social Psychiatry*, 1-3. DOI: 10.1177/0020764020939984
- Marsudi, R.L.P. (2020a). Remarks Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia: Video Conference Ministerial Meeting for the Alliance for Multilateralism.  
<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1226/pidato/remarks->

minister-for-foreign-affairs-of-  
the-republic-of-indonesia-video-  
conference-ministerial-meeting-  
for-the-alliance-for-  
multilateralism

Marsudi, R.L.P. (2020b). International  
Cooperation to Mitigate COVID-  
19: Indonesia, Southeast Asia,  
and Beyond.  
[https://csis.or.id/events/interna-  
tional-cooperation-to-mitigate-  
covid19-indonesia-southeast-asia-  
and-beyond](https://csis.or.id/events/international-cooperation-to-mitigate-covid19-indonesia-southeast-asia-and-beyond)

Marsudi, R.L.P. (2020c). Cooperation: The  
Catalyst for Fighting the COVID-  
19 Crisis. *Jakarta Post*, March 25.  
[https://www.thejakartapost.com  
/academia/2020/03/24/cooperat  
ion-the-catalyst-for-fighting-the-  
covid-19-crisis.html](https://www.thejakartapost.com/academia/2020/03/24/cooperation-the-catalyst-for-fighting-the-covid-19-crisis.html)

Marsudi, R.L.P. (2020d). Building  
Regional Resilience against  
COVID-19. *Jakarta Post*, April 14.  
[https://www.thejakartapost.com  
/academia/2020/04/14/building  
-regional-resilience-against-  
covid-19.html](https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/14/building-regional-resilience-against-covid-19.html)

Mietzner, M. (2020). Populist Anti-  
Scientism, Religious Polarisation,  
and Institutionalised Corruption:  
How Indonesia's Democratic

Decline Shaped Its COVID-19  
Response. *Journal of Current  
Southeast Asian Affairs*, 39(2). 227-  
249. DOI:  
10.1177/1868103420935561

Organization of Islamic Cooperation.  
(2020). Statement Issued by the  
Extraordinary Meeting of the OIC  
Steering Committee on Health on  
COVID-19 Pandemic.  
[https://www.oic-  
oci.org/topic/?t\\_id=23322and  
t\\_ref=13979andlan=en](https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23322andt_ref=13979andlan=en)

Percaya, D. (2020). Indonesia Calls for  
Concrete Measures for Economic  
Recovery in APEC Meeting.  
*Jakarta Post*, May 28.  
[https://www.thejakartapost.com  
/news/2020/05/28/indonesia-  
calls-for-concrete-measures-for-  
economic-recovery-in-apec-  
meeting.html](https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/28/indonesia-calls-for-concrete-measures-for-economic-recovery-in-apec-meeting.html)

Strait Times. (2020). Wuhan Virus:  
Indonesia Sends Plane to Fetch  
250 of Its Nationals Stranded in  
Hubei. February 1.  
[https://www.straitstimes.com/a  
sia/se-asia/indonesia-sends-a-  
plane-to-fetch-250-of-its-  
nationals-stranded-in-hubei-  
province-in](https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesia-sends-a-plane-to-fetch-250-of-its-nationals-stranded-in-hubei-province-in)

Triwibowo, A. (2020). Diplomacy and Covid-19: A Reflection. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.  
<http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3861>

World Health Organization. (2020). Archived: WHO Timeline - COVID-19.  
<https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>

Worldometer. (2020). Covid-19 Coronavirus Pandemic Update.  
[https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm\\_campaign=homeAdvegas1?%22%20%5C1%20%22countries](https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22%20%5C1%20%22countries)